

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basid dan Angga Putra Yudiansyah, “Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Berbentuk Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum”, *Jurnal Pro Hukum*. Vol 10. No.2 hal 43, (Gresik,2021)
- Abdul Hakam Sholahuddin, dkk, “Pelaksanaan pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum: Pelanggaran kampanye pemilu 2019 di Kabupaten Blitar”, *Jurnal Supermasi*. Vol. 9. No. 2. Hlm. 17-27, (Blitar, 2019)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung:Citra Aditya Bakti,2004) hlm.134
- Alvianus Kristian Sumual dan Brilliant Johannes Maengko, *Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Pancasila, Journal Of Law and Nation (JOLN)*. Vol. 2 No. 2, hlm. 99, (Manado, 2023).
- Antar Venus, *Manajemen Kampanye*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 7
- Arikunto, *Manajemen Pengajaran.*, Hlm. 114
- Azka Abdi Amruobbi, “Problematika sampah visual media luar ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada”, *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Vol. 4, No. 2, hlm. 66-78, (Sleman, 2021)
- Djazuli,(2009), *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Media Group, hlm 48
- DR. H. Yusri Munaf, SH.M.HUM, *Hukum Administrasi Negara* (Pekanbaru: Cetakan Pertama Marpoyan Tujuh,2016), hlm. 77-78
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme,”*Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268.

H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, hlm 53-54

Hasil wawancara dengan Bapak Eka Fifty Anugrah selaku staf sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar pada tanggal 13 Maret 2024

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Bahaudin Divisi Sosialisasi, pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 15 Maret 2024

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 116

<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-otonomi-daerah/> diakses pada tanggal 7 Desember 2023

<https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-blitar/> diakses pada tanggal 25 Maret 2024 pada pukul 11.34 WIB

<https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-blitar/> diakses pada tanggal 18 April 2024 pada pukul 07.22 WIB

<https://surabaya.kompas.com/read/2023/12/14/135828278/lebih-dari-32-persen-apk-di-kabupaten-blitar-langgar-ketentuan> diakses pada tanggal 26 Februari 2024 pada pukul 13.50 WIB

<https://www.blitarkab.go.id/kondisi-umum-wilayah-kabupaten-blitar/> diakses pada tanggal 25 Maret 2024 pada pukul 12.16 WIB

Isna Nur Hudatul Hasanah dan Chandra Dewi Puspitasari, “Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman”, *E-Journal Student UNY*. Vol. 10, No. 04, hlm. 361, (Yogyakarta, 2021)

J. Suyuti Palungga, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT R Grafindo Persada, 1994), 27-28

Jeje Abdul Rajak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),7.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 418.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.416

Kamus Besar Bahasa Indonesia

L Maria, D. Mahendra, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020)

M. Arafat Hermana dan Dwi Putra Jaya, “Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”, *AL-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 6, No. 2, hlm. 249, (Bengkulu, 2021)

Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Cetakan keempat, Liberty,2006),hlm 68

Mochtar Mas’oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003), hlm. 43

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hlm.1

Nurmayani, S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung. 2009.HLM.26

Pedoman Skripsi Penyusunan Skripsi Progam Strata Satu (1) Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2018

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum pasal 26

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 23 ayat (3)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 7

PKPU nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 36

Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 367

Rahmatullah, “Filsafat Hukum Sejarah: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia”

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, Tahun 2011, Hlm. 101-102

Rizky Darmawanyah Sihombing, *Problematika Alat Peraga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarianisme*, Grondwet Jurnal Hukum dan Tata Negara dan Hukum Admnistasi Negara, Vo. 3, No. 1 hlm. 312, Sumatra Utara, 2024

Samsudin, S.Hut., M.Si Dkk, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020), hlm. 17

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Pubblishing, 2015), hlm. 8-9

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126

Surat An-Nisa’ Ayat 58

Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm. 41

Syabrina Yolanda Chansa Damanik dan Khalid, “Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan”, *Unes Law Review*. Vol. 6, No. 2, hlm. 7479, (Medan, 2023)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (35)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 298

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2

Usman Jafar, “*Negara Dalam Pemikiran Politik (Analisi Dengan Pendekatan Siyasah Syari’ah)*” al-Hikmah VII, no.1 (2011), hlm.77

Yandi Ugang, “*Analisis Utilitarianisme Dalam penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum*”, Jurnal Transparansi Hukum 5, no. 2 (2022): 119-124